

## **Penganggaran Pada Badan Layanan Umum (BLU) (Studi Kasus Pada RSUP Dr. M. Djamil Padang)**

**oleh: Rila Oktavia**

**(Dibawah bimbingan Dr. Hefrizal Handra, M. Soc. Sc. dan Drs. Masrizal, M. Soc. Sc.)**

### **ABSTRAK**

Rumah sakit pemerintah merupakan institusi pelayanan publik yang memegang peranan penting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan semakin tingginya tuntutan bagi rumah sakit pemerintah untuk meningkatkan pelayanannya, banyak permasalahan muncul terkait dengan terbatasnya anggaran yang tersedia, alur birokrasi yang panjang, aturan pengelolaan keuangan yang menghambat kelancaran pelayanan dan sulitnya mengukur kinerja. Melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), rumah sakit pemerintah diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, *enterpreneurship*, transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui instrumen yang terdiri dari observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Data juga diperoleh melalui penelitian dokumen-dokumen RSUP Dr. M. Djamil Padang.

Dari hasil penelitian ini, mekanisme penganggaran BLU dilakukan melalui penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Rencana Bisnis dan Anggaran RSUP Dr. M. Djamil Padang secara garis besar telah mengikuti format yang terdapat dalam Permenkes no. 4 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran, namun dalam perhitungan biaya perunit layanan masih belum tepat. Dalam proses usulan, unit-unit yang ada di rumah sakit sering kesulitan dalam menyiapkan dokumen pendukung kerangka acuan kerja (KAK). Selanjutnya sering terjadi revisi DIPA untuk memenuhi kebutuhan belanja farmasi. Faktor-faktor penyebab permasalahan dalam penganggaran kurangnya kompetensi SDM khususnya dalam hal perencanaan dan penyusunan anggaran.

Kata Kunci : Penganggaran, BLU